

PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

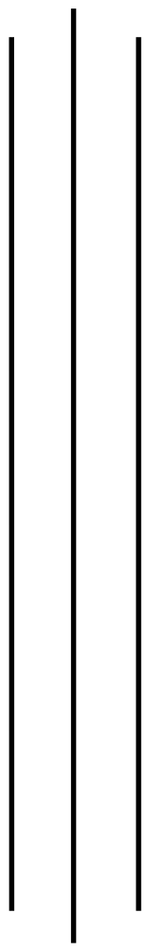
RENCANA KERJA TAHUN 2022

dpmptsp@sragenkab.go.id
dpmptsp.sragen@gmail.com

0271 892348
0271 8961359

dpmptsp.sragenkab.go.id

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2022.

Renja ini merupakan dokumen implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Dalam Renja DPMPTSP Tahun 2022 ini, dijabarkan berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. serta demi terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih *(clean government*). Besar harapan kami saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan Renja ini.

Sragen, 20 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PM PTSP SRAGEN

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5. Penelaahan Usulan dan Program/Kegiatan Masyarakat ... 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 35

3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V PENUTUP 51

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Bagan Alur Renja SKPD	3
Gambar 1.2	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	4
Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	10
Tabel II.2	Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan	18
Tabel II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	36
Tabel III.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023	37
Tabel III.3	Rancangan Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022	38
Tabel IV.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Sragen	46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

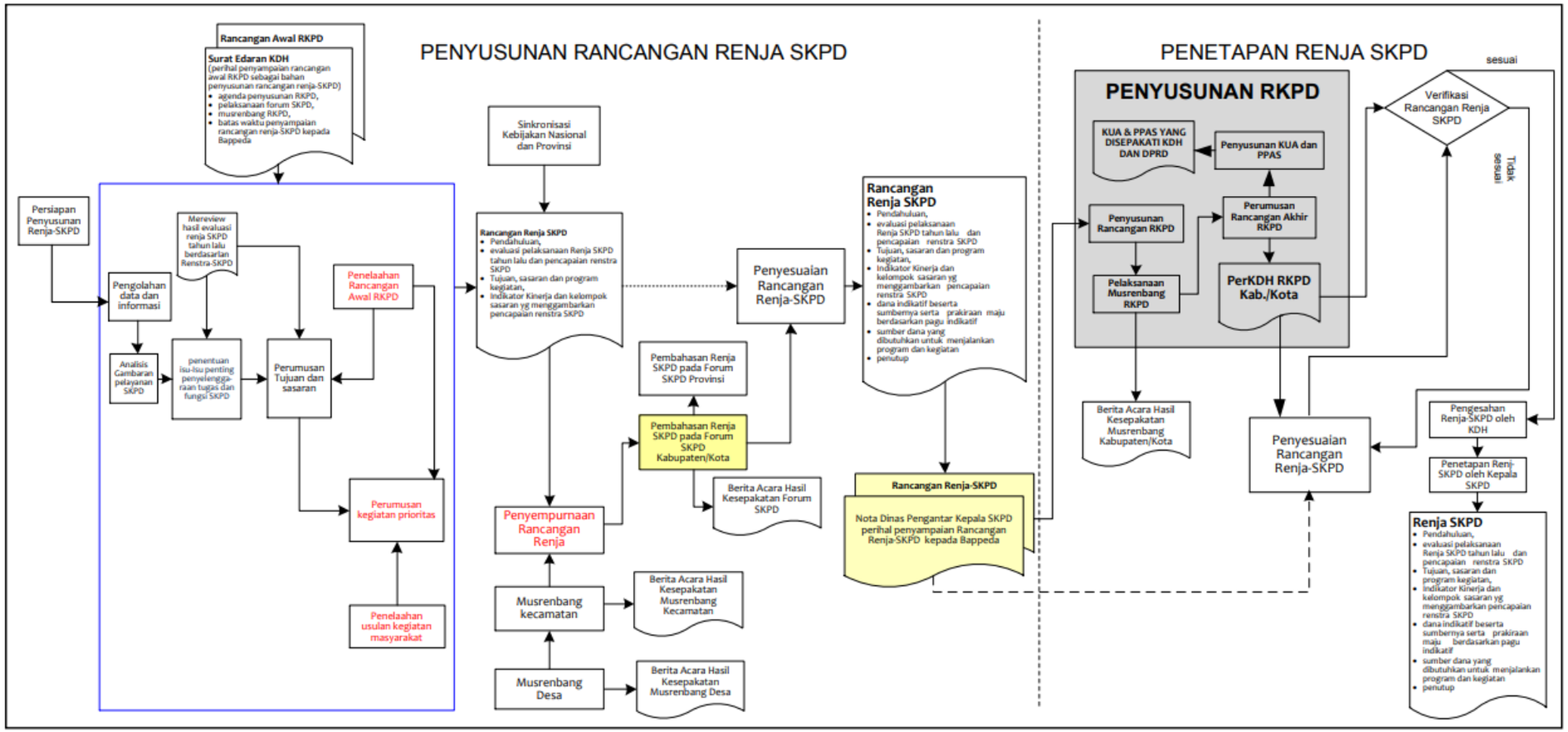
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Tahun 2022 adalah tahun pertama periode RPJMD Bupati terpilih, maka penyusunan renja sebagai dokumen perencanaan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022. Renja ini memuat program dan kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah-arah pedoman terhadap semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2022. Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini, sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

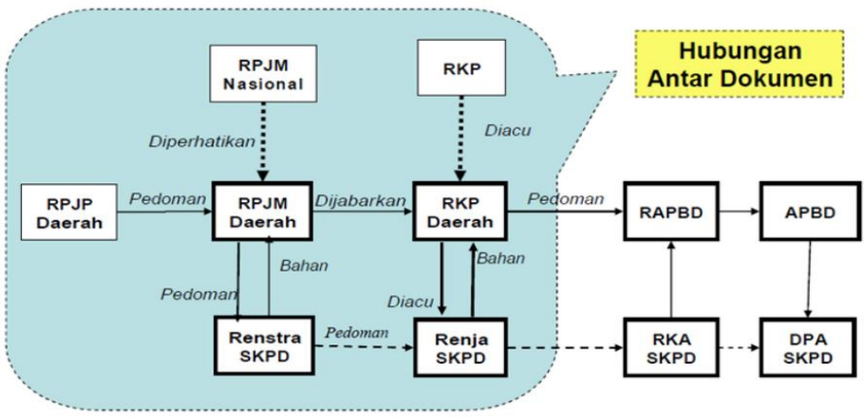
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja merupakan dokumen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana.



Gambar 1.1

Bagan alur penyusunan renja

Renja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan penyhusunan rencana kerja dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan renja tahun 2022 didasarkan pada :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
o. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
p. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

q. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

r. Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 050/2033/034/2021 tentang Verifikasi Renja OPD Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja tahun 2022 dimaksudkan ;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2022 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2022 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Latar Belakang

1.1 Landasan Hukum
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sepanjang tahun 2020 yang lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan promosi atau pameran investasi yang dilaksanakan sebanyak 2 even pameran. Pelaksanaan pameran even promosi ini dilaksanakan di Surakarta dan Semarang adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya even promosi ini diharapkan mampu membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Sragen untuk dipasarkan di luar Sragen. Dengan merebaknya pandemi covid-19 satu even promosi dilaksanakan secara *virtual* yaitu *Central Java Investment Forum* (CJIBF) yang di koordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen, juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan/nonperizinan, sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan yang dilakukan ke seluruah wilayah Kabupaten Sragen secara bertahap. Dengan peningkatan kegiatan-kegiatan tersebut di atas jumlah investor diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investor pada tahun 2020 yang menanamkan investasinya sebanyak 13.911 investor, mengalami peningkatan peningkatan yang besar dibanding tahun 2019

walaupun kenaikan itu didominasi oleh sektor UMKM. Sedangkan realisasi investasi meningkat sebesar Rp. 1,9 trilyun rupiah naik sekitar 5% dari realisasi tahun sebelumnya (2019) yaitu Rp. 1,8 milyar rupiah.

3. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya perizinan/ nonperizinan maka dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan. Sepanjang tahun 2020 perizinan yang dilakukan pengawasan sebanyak 145 izin dari target 120 izin, meningkat dibanding tahun 2019 sebanyk 81. Pengawasan dilakukan guna meningkatkan tertib administrasi perizinan guna meningkatkan iklim investasi yang sehat.
4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha/ pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayaan perizinan dan nonperizinan. Pelaksanaan survei berdasrkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden ditetapkan berdasarkan Tabel Morgan sebanyak 368 responden dengan indeks **82,20** yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan **Baik** atau bernilai **B**.

Tabel. II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan (Renstra 2021)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Target program dan kegiatan (Renja 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2021		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan**	**60**	**bulan**	**36**	**bulan**	**12**	**bulan**	**12**	**bulan**	**100**	**%**	**12**	**bulan**	**60**	**bulan**	**100**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	**%**	12	bulan	60	bulan	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	unit	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan	jumlah unit kendaraan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	118	unit	70	unit	21	unit	23	unit	110	%	21	unit	114	unit	97
4	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	unit	100
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	unit	26	unit	13	unit	18	unit	138	%	13	unit	57	unit	143
11	Penyediaan bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
14	Penyediaan jasa pengemudi	jumlah bulan penyediaan jasa pengemudi	48	bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	48	bulan	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran yang baik**	**60**	**bulan**	**36**	**bulan**	**12**	**bulan**	**12**	**bulan**	**100**	**%**	**12**	**bulan**	**60**	**bulan**	**100**
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit penyediaan kendaraan dinas	6	unit	0	unit	3	unit	3	unit	100	%	3	unit	6	unit	100
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit penyediaan perlengkapan gedung kantor	7	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100	%	2	unit	6	unit	86
17	Pengadaan mebeleur	Jumlah unit pengadaan meubeleur	69	unit	18	unit	21	unit	21	unit	100	%	21	unit	60	unit	87

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
20	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	42	unit	20	unit	10	unit	9	unit	90	%	10	unit	39	unit	93
21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	60	bulan	100
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tingkat kedisiplinan penggunaan seragam**	**100**	**prosen**	**100**	**prosen**	**100**	**prosen**	**100**	**prosen**	**100**	**%**	**100**	**prosen**	**100**	**prosen**	**100**
22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	192	stel	38	stel	38	stel	0	stel	0	**%**	38	stel	76	stel	40
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	**Jumlah pameran yang diikuti**	**10**	**even**	**6**	**even**	**2**	**even**	**2**	**even**	**100**	**%**	**2**	**even**	**10**	**even**	**100**
		jumlah investor	**6,840**		**2,947**	**investor**	**1,735**	**investor**	**13,911**	**investor**	**802**	**investor**	**1,785**	**investor**	**18,643**	**investor**	**273**
23	Penyelenggaran Pameran Investasi	Jumlah even pameran/promosi investasi yang diikuti dalam satu tahun	10	kali	6	kali	2	kali	1	kali	50	**%**	2	kali	9	kali	90
24	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah (UMKM)	Jumlah UKM yang difasilitasi kerjasama dengan pengusaha besar/menengah	160	ukm	40	ukm	40	ukm	0	ukm	0	**%**	40	ukm	80	ukm	50
25	Pengembangan Potensi Unggulan daerah	Jumlah dokumen profil investasi yang dihasilkan	3	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100	**%**	1	paket	3	paket	100
26	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah pemohon perizinan dalam satu tahun	28	koordinasi	4	koordinasi	6	koordinasi	2	koordinasi	33	**%**	6	koordinasi	12	koordinasi	43
27	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah perizinan bidang jasa usaha yang dilakukan pemeriksaan / verifikasi lapangan	1,350	lokasi	432	lokasi	360	lokasi	42	lokasi	12	**%**	252	Lokasi	726	lokasi	54

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
28	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan bimbingan/ pembinaan penyusunan LKPM	216	perusahaan	105	perusahaan	50	perusahaan	35	perusahaan	70	%	50	perusahaan	190	perusahaan	88
29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah perizinan reklame yang dilakukan monitoring evaluasi	360	lokasi	76	lokasi	250	lokasi	17	lokasi	7	%	250	lokasi	343	lokasi	95
30	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah aparatur yang diikutsertakan dalam bimbingan teknis/diklat	70	orang	0	0	35	orang	35	Orang	100	%	30	orang	65	orang	93
31	Pembuatan Papan Reklame	Jumlah papan reklame yang disediakan	3	unit	0	unit	2	unit	0	unit	0	unit	2	unit	2	unit	67
32	Sosialiasasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	1,410	orang	980	orang	210	orang	0	orang	0	%	210	orang	1190	orang	84
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	**nilai IKM**	**82**	**poin**	**81.27**	**poin**	**81.00**	**poin**	**82.20**	**poin**	**101**	**%**	**82.00**	**poin**	**81.82**	**poin**	**100**
		Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan	**640**	**izin/ nonizin**	**331**	**izin/ nonizin**	**140**	**izin/ nonizin**	**145**	**izin/ nonizin**	**104**	**izin/ nonizin**	**140**	**izin/ nonizin**	**616**	**izin/ nonizin**	**96**
33	Operasional/Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, perijinan dan penanganan pengaduan	Jumlah perizinan bidang perizinan tertentu dan kesehatanyang dilakukan pemeriksaan / verifikasi lapangan	1940	lokasi	1074	lokasi	400	lokasi	220	lokasi	55	%	400	lokasi	1694	lokasi	87
35	Penyederhanaan Prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah dokumen/ media informasi tentang pelayanan ptsp	2	dok	0	dok	1	dok	1	dok	100	%	1	dok	2	dok	100
37	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan kepala daerah bidang perizinan / nonperizinan yang dihasilkan	9	rancangan	2	ranc	1	ranc	2	ranc	200	%	1	rancangan	5	rancangan	56

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
38	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah perusahaan yang dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan penanaman modal	320	perusahaan	160	perush	60	perusahaan	40	perusahaan	67	%	60	perusahaan	260	perusahaan	81
39	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah period pelaksanaan SKM	8	periode	6	periode	2	periode	1	periode	50	%	2	periode	9	periode	113
40	Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah izin/nonizin usaha yang dilakukan pengawasan	500	izin/ nonizin	345	izin/nonizin	140	izin/ nonizin	145	izin/nonizin	104	%	140	izin/ nonizin	630	izin/ nonizin	126
41	Penanganan pengaduan	Jumlah aduan/kasus yang ditindaklanjuti	45	kasus	13	kasus	15	kasus	8	kasus	53	%	15	kasus	36	kasus	80
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	**Prosentase perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara *online***	**70**	**prosen**	**32**	**prosen**	**50**	**prosen**	**39**	**prosen**	78	%	**70**	**prosen**	**47.00**	**prosen**	67
43	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah aplikasi sistem informasi pelayanan publik yang disediakan	1	aplikasi	1	aplikasi	0	aplikasi	0	aplikasi	0	%	1	aplikasi	2	aplikasi	200

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020, kinerja DPMPTSP Kabupten Sragen dapat digunakan untuk mengukur/ memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Adapun capaian indikator pada tahun 2020 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan promosi atau pameran investasi yang dilaksanakan sebanyak 1 kali even pameran dari target renstra 2 even. Untuk tahun 2020 pelaksanaan even promosi dilakukan hanya satu kali karena pandemi *covid19.* Pelaksanaan even promosi ini dengan mengikuti *Central Java Investment Forum* (CJIBF) yang dikoordinasikan oleh DMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara *virtual* adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya even ini diharapkan mampu membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Sragen untuk dipasarkan di luar Kabupaten Sragen.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen, DPMPTSP Kabupaten selain peningkatan promosi, juga melakukan upaya peningkatan pelayanan. Dengan peningkatan kegiatan-kegiatan tersebut di atas diharapkan jumlah investor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investor pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah investor yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya dari 863 menjadi 13.911 investor yang menanamkan investasinya dari target sebanyak 1.735 investor. Tren kenaikan ini didominasi UMKM terkait adanya program bantuan dari pemerintah. Hal ini sebandiang dengan kenaikan dengan realisasi investasi sebesar dari Rp. 1.801 milyar rupiah di tahun 2019 menjadi Rp. 1.980 milyar rupiah.
3. Sepanjang tahun 2020 perizinan yang dilakukan pengaawasan sebanyak 145 izin dari target 120 pengawasan izin (120%). Hal ini

mengalami peningkatan sebagai komitmen perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan perizinan sebagai upaya ketertiban dan kepatuhan perizinan.

4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pengguna layanan/ pelaku usaha, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayaan perizinan dan nonperizinan. Pelaksanaan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pelaksanaan survei adalah 82,20 dengan kategori Baik atau bernilai B. Adapun target tahun 2020 adalah 81,00.
5. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*/OSS), maka OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Selama tahun 2020 tercatat izin yang diproses melalui OSS sebanyak 12.224 UMKM dan 309 non IUMK.

   Manfaat :

   - Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
   - Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
   - Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat

- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

6. Selain penggunaan *Online Single Submission* (OSS), DPMPTSP Kabupaten Sragen telah melaksanakan aplikasi perizinan *online* dengan nama Sistem Perizinan *Online* Sragen (SI PIONER). Aplikasi SI PIONER digunakan untuk pelayanan perizinan yang tidak tercantum dalam kewenangan *Online Single Submission* (OSS). Diharapkan pula semua jenis layanan yang menjadi kewenangan DPMPTSP yang tidak diakomodasi dalam OSS, dapat diakomodasi dalam SI PIONER. Sampai saat ini 39% jenis layanan perizinan, yang tidak termasuk dalam kewenangan OSS, dapat dilayani secara *online* melalui SI PIONER. Hal ini masih di bawah target renstra tahun 2021 sebesar 70%. Diharapkan di tahun 2021 aplikasi ini dilakukan pengembangan demi penyempurnaan, sehingga diharapkan semua jenis layanan perizinan/nonperizinan (non OSS) dapat dilakukan secara *online.*

Tabel II.2

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai investasi		√	1,87 trilyun rp	1,98 trilyun rp	2,10 trilyun rp	1,50 trilyun rp	1,87 trilyun	1,98 trilyun rp	0,40 trilyun rp	1,5 trilyun rp
2	Jumlah even promosi investasi			2 even	2 even	2 even		2 even	1 even	1 even	2 even
3	Kenaikan/ penurunan investasi		√	%	%	%	%	8,7 %	9,8 %	11 %	%
4	Jumlah investor		√	1.760 investor	1,735 investor	1,785 investor		863 investor	13.911 investor	3.245 investor	1,785 investor
5	Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan			120 izin	140 izin	140 izin		81 izin	145 izin	91 izin	izin
6	Indeks Kepuasan Masyarakat		√	81,00 poin	81.00 poin	82.00 poin		81,59 poin	82,20 poin	82,69 poin	82,20 poin
7	Prosentase perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online			50 %	70 %	70 %		39 %	39 %	80 %	%

Ket :

*) **:** sampai dengan Tri Wulan II

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksudkan, DPMPTSP Kabupaten Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

Selain itu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yaitu pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Upaya peningkatan penanaman modal dilakukan melalui penerbitan kebijakan di bidang penaman modal yang meliputi;

   - Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal; dan
   - Pembuatan Peta Potensi Investasi.

   Diharapkan dengan kebijakan ini terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal. Upaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan daya saing investasi daerah juga dilakukan melalui kebijakan deregulasi/ penyederhanaan peraturan di bidang investasi, baik menyangkut dissentif investasi maupun perizinan di bidang investasi.

2. Promosi Penanaman Modal

   Upaya peningkatan investasi melalui promosi investasi dan kerjasama investasi yang dilakukan dengan pihak instansi pemerintah, investor

maupun pihak ketiga. Pelaksanaan promosi penanaman dilakukan melalui kegiatan ;

- Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal
- Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal merupakan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penanaman modal dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Penanaman Modal meliputi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Disisi lain Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Melalui OSS pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Dengan demikian penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan

berusaha di Indonesia, maka keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sangat diperlukan. MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah :

   a. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
   b. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
   c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

   Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Sedangkan ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini meliputi kegiatan :

   a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
   b. Pembinaan pelaksanaan penananam modal.
   c. Pengawasan pelaksanaan penananam modal

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi perizinan *online,* yang merupakan aplikasi pendukung OSS, digunakan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan pengembangan aplikasi ini, maka seluruh kewenangan bidang perizinan/nonperizinan yang tidak terakomodasi pada OSS, juga dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan *online*.

Dengan penerapan teknologi informasi, maka diharapkan hanya ada satu data dan tidak terjadi tumpang tindih seperti yang sering terjadi.

6. Isu penting lain di tahun 2022 pada Urusan Penanaman Modal adalah
   a. Rendahnya daya saing daerah;
   b. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
   c. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/ PMDN;
   d. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan antara lain;

1. Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan investasi;
2. Peningkatan ketersediaan dokumen potensi sektor investasi, sehingga memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modal;
3. Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;
4. Meningkatkan promosi peluang dan potensi investasi di Kabupaten Sragen dengan mengikuti even dan forum pameran investasi;
5. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara *mobile* sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna lebih meningkatkan kualitas layanan perizinan melalui OSS Berbasis Resiko (*Risk Based Aproach/RBA)* dan peningkatan kapasitas petugas layanan;
7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur pelayanan melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pendidikan latihan (diklat);
8. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP);
9. Meningkatkan sosialisasi kepada investor guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan di bidang penanaman modal baik terkait pelaksanaan usaha maupun dalam pelaporan (LKPM);
10. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan bidang perizinan penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan;
11. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam penerapan satu pintu di bidang informasi dan data.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub Bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu: 1) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan 3) penjelasan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2022, atau program/kegiatan/subkegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda.

Penjelasan pada bagian ini belum dapat disajikan karena hingga penyusunan Renja ini, Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2022 yang belum menyajikan lampiran matrik program/ kegiatan/ subkegiatan secara rinci.

Tabel. II.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**					**6,532,000,000**	18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**					**7,574,900,416**	
18.1.2.01	**Kegiatan Rencana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**44,000,000**	18.1.2.01	**Kegiatan Rencana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**0**	
18.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya dokumen perencanaan	1	dok	24,000,000	18.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya dokumen perencanaan				
18.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya dokumen laporan kinerja	2	dok	20,000,000	18.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya dokumen laporan kinerja				
18.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**4,900,000,000**	18.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**4,082,794,301**	
18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bl	4,900,000,000	18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bl	4,082,794,301	
18.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**275,000,000**	18.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**48,436,000**	
18.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMPTSP	tersedianya mesin antrian tersedianya mesin presensi	2	unit	45,000,000	18.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMPTSP	tersedianya mesin antrian tersedianya mesin presensi				
18.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	tersedianya pakaian dinas dan atribut	40	stel	48,000,000	18.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	tersedianya pakaian dinas dan atribut	38	stel	34,520,000	dukungan MPP

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya	10	org	70,000,000	18.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya	4	org	13,916,000	
18.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah peserta sosialisasi	80	org	70,000,000	18.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah peserta sosialisasi		org		
18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	36	org	42,000,000	18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis		org		
18.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**769,000,000**	18.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**1,131,655,245**	
18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	12	bl	20,000,000	18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	12	bl	26,735,245	
18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan kantor jumlah unit penyediaan peralatan kantor sebagai pengganti peralatan yang sudah rusak	12	bl	240,000,000	18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan kantor jumlah unit penyediaan peralatan kantor sebagai pengganti peralatan yang sudah rusak	12	bl	718,564,000	daya dukung MPP
18.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga	2	unit	25,000,000	18.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga		unit		
18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai jumlah bulan penyediaan makan minum rapat dan tamu	12	bl	120,000,000	18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai jumlah bulan penyediaan makan minum rapat dan tamu	12	bl	72,798,000	
18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12	bl	140,000,000	18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12	bl	118,852,000	
18.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bl	4,000,000	18.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bl	3,600,000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah	12	bl	140,000,000	18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah	12	bl	100,000,000	
18.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip	12	bl	40,000,000	18.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip	12	bl	12,172,000	dukungan MPP
18.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan aplikasi	12	bl	40,000,000	18.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan aplikasi	12	bl	78,934,000	dukungan MPP
18.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DPMPTSP				**102,000,000**	18.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DPMPTSP				**1,919,371,870**	
18.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan kendaraan bermotor roda dua	1	unit	35,000,000	18.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan kendaraan bermotor roda dua		unit		
18.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Tersedianya mebel kantor	4	unit	25,000,000	18.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Tersedianya mebel kantor	1	paket	1,919,371,870	dukungan MPP
18.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	3	unit	24,000,000	18.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor		unit		
18.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	4	unit	18,000,000	18.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya		unit		
18.1.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				**214,000,000**	18.1.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				**197,801,000**	
18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bl	4,000,000	18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bl	1,199,000	
18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	bl	40,000,000	18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	bl	38,944,000	
18.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	12	bl	40,000,000	18.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	12	bl	27,739,000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas	12	bl	130,000,000	18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas	12	bl	129,919,000	
18.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				**228,000,000**	18.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				**194,842,000**	
18.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas	12	bl	180,000,000	18.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas	12	bl	180,000,000	
18.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor	12	bl	8,000,000	18.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor	12	bl	2,022,000	
18.1.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit pemeliharaan aset tetap lainnya	3	unit	30,000,000	18.1.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit pemeliharaan aset tetap lainnya		unit		
18.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya	12	bl	10,000,000	18.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya	12	bl	12,820,000	
18.2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM**	DPMPTSP				**330,000,000**	18.2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM**	DPMPTSP				**100,000,000**	
18.2.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**130,000,000**	18.2.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**0**	
18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah dokumen fasilitas/insentif penanaman modal	1	dok	100,000,000	18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah dokumen fasilitas/insentif penanaman modal		dok		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.2.2.01.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Monitoring dan evaluasi	4	keg	30,000,000	18.2.2.01.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Monitoring dan evaluasi		keg		
18.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**200,000,000**	18.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**100,000,000**	
18.2.2.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah dokumen pedoman penanaman modal	1	dok	80,000,000	18.2.2.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah dokumen pedoman penanaman modal		dok		
18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pemetaan profil umkm	1500	perus	120,000,000	18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pemetaan profil penanaman modal	400	perus	100,000,000	
18.3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				**310,000,000**	18.3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				**152,000,000**	
18.3.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	DPMPTSP				**310,000,000**	18.3.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	DPMPTSP				**152,000,000**	
18.3.2.01.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Content layanan publik sistem informasi umkm	1 1	video apl	130,000,000	18.3.2.01.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Content layanan publik sistem informasi umkm		video apl		
18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pameran/forum investasi	2	kali	180,000,000	18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pameran/forum investasi	2	kali	152,000,000	
18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				**780,000,000**	18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				**385,927,000**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.4.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**780,000,000**	18.4.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**385,927,000**	
18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1125	NIB	260,000,000	18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1125	NIB	92,334,000	
			jumlah permohonan perizinan/nonperizinan melalui perizinan online	3000	pmh					jumlah permohonan perizinan/nonperizinan melalui perizinan online	3000	pmh		
18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	500	NIB	260,000,000	18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	500	NIB	173,593,000	
			jumlah pemeriksaan dan verifikasi perizinan/ nonperizinan	600	pmh					jumlah pemeriksaan dan verifikasi perizinan/ nonperizinan	600	pmh		
18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah aduan ditindak lanjuti	10	aduan	60,000,000	18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	DPMPTSP	Jumlah aduan ditindak lanjuti	10	aduan	20,000,000	
			jumlah pemohon layanan konsultasi dan informasi	80	pmh					jumlah pemohon layanan konsultasi dan informasi	80	pmh		
			jumlah periode survei kepuasan masyarakat	2	kl					jumlah periode survei kepuasan masyarakat	2	kl		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.4.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Fasilitasi perizinan umkm	300	org	200,000,000	18.4.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Fasilitasi perizinan umkm	150	org	100,000,000	
18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**414,000,000**	18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**96,000,704**	
18.5.2.01	**Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**					**414,000,000**	18.5.2.01	**Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**					**96,000,704**	
18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	60	perus	84,000,000	18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	60	perus	21,229,204	
18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan penyusunan LKPM	60	perus	230,000,000	18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan penyusunan LKPM	60	perus	14,771,000	
18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah pengawasan perizinan penanaman modal	100	perus	100,000,000	18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pengawasan perizinan penanaman modal	100	perus	60,000,500	
18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**120,000,000**	18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**20,000,000**	
18.6.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**120,000,000**	18.6.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**20,000,000**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12	13
18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Aplikasi sistem informasi layanan publik	2	apl	120,000,000	18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	dokumwn sistem informasi layanan publik	1	dok	20,000,000	
	Jumlah					**8,486,000,000**		Jumlah					**8,328,828,120**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, dan perguruan tinggi. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain: 1) penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; dan 2) penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Namun demikian untuk sejak rencana kerja tahun 2022 disusun, tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Mengingat tahun 2022 adalah tahun pertama periode pelaksanaan Renstra 2021-2026, dan dokumen Renstra belum ada maka program/kegiatan/subkegiatan yang disusun berdasarkan rancangan awal RKPD. Tdak semua program dan kegiatan dapat diakomodir, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka tahun 2022 program yang dijalankan sebanyak 6 (enam) program, dan kegiatan yang dijalankan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 tertuang dalam 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 diharapkan sebesar 5,5%. Kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) perbaikan kualitas SDM; (2) Peningkatan investasi; (3) Peningkatan produktivitas; dan (4) perbaikan pasar tenaga kerja.
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, menurut RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, ditujukan pada "**Penguatan kesejahteraan dan Perekonomian masyarakat didukung penguatan Ekonomi Daerah**", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
b. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal saerah.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah "**Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya dengan semangat gotong royong**". Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
b. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan.
d. Penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
e. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan tahun pertama pelaksanaan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Namun karena RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026 masih dalam proses penyusunan, maka penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Sragen Tahun.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 adalah **"mewujudkan ketangguhan SDM sebagai pengungkit daya saing daerah",** dengan 4 prioritas daerah yaitu;

a. Peningkatan kualitas SDM dalam masa pandemi.
b. Penanganan kemisikinan dan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.
c. Penyediaan infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah.
d. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan tahunan. Rencana strategis memuat target indikator kinerja tingkat sasaran srategis untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja tujuan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2022, yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
DPMPTSP Tahun 2022

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Menciptakan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai investasi (trilyun rupiah)	1,5	jumlah investor pada tahun berjalan	Jumlah investor (perusahaan)	1.125

3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang nantikan dipetakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Program/kegiatan/ kegiatan di tahun 2022 antara lain;

Tabel III.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan
DPMPTSP Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1	2	3	4
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

1	2	3	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1	2	3	4
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel III.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Kebutuhan Tahun 2022							Sumber Dana	Catatan	Prakiraan Maju 2023		
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif			Target		Pagu
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**					**7,574,900,416**					**8.960.000.000**
18.1.2.01	**Kegiatan Rencana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**44,000,000**					**48.000.000**
18.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya dokumen perencanaan	1	dok	24,000,000	DAU	Penyusunan dokumen renja dan RKA	1	dok	24.000.000
18.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya dokumen laporan kinerja	2	Dok	20,000,000	DAU	Penyusunan dokumen LKjIP	2	Dok	24.000.000
18.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**4,082,794,301**					**5.200.000.000**
18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bl	4,082,794,301	DAU	Penyediaan gaji ASN	14	bl	5.200.000.000
18.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**205,436,000**	DAU				**281.000.000**
18.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMPTSP	tersedianya mesin antrian tersedianya mesin presensi	1	paket	45,000,000	DAU	Penyediaan mesin	1	paket	45.000.000
18.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	tersedianya pakaian dinas dan atribut	38	stel	34,520,000	DAU	Penyediaan seragam pelayanan	36	stel	54.000.000
18.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya	4	org	13,916,000	DAU	Pendidikan dan latihan pegawai	10	org	70.000.000
18.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah peserta sosialisasi	80	org	70,000,000	DAU	Sosialisasi bidang perizinan dan penanaman modal	80	org	70.000.000
18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	36	org	42,000,000	DAU	Bimbingan teknis aparatur ptsp dan investasi	36	org	42.000.000
18.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DPMPTSP				**1,156,655,245**					**866.000.000**

1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	12	bl	26,735,245	DAU		12	bl	25.000.000
18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan kantor jumlah unit penyediaan peralatan kantor sebagai pengganti peralatan yang sudah rusak	12	bl	718,564,000	DAU	Penyediaan peralatan kantor	12	bl	300.000.000
18.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga	2	unit	25,000,000	DAU	Penyediaan peralatan rumah tangga	2	unit	30.000.000
18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai jumlah bulan penyediaan makan minum rapat dan tamu	12	bl	72,798,000	DAU	Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	12	bl	120.000.000
18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12	bl	118,852,000	DAU	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (brosur, leaflet)	12	bl	150.000.000
18.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bl	3,600,000	DAU	Penyediaan bahan bacaan majalah dan koran	12	bl	6.000.000
18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah	12	bl	100,000,000	DAU	Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah	12	bl	150.000.000
18.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip	12	bl	12,172,000	DAU	Penyediaan jasa arsip dan	12	bl	40.000.000
18.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan aplikasi	12	bl	78,934,000	DAU	Penyediaan biaya aplikasi dan informasi teknologi	12	bl	45.000.000
18.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DPMPTSP				**1,996,371,870**					**585.000.000**
18.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan kendaraan bermotor roda dua	1	unit	30,000,000	DAU	Penyediaan kendaraan dinas untuk peningkatan layanan MPP	1	unit	35.000.000
18.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Tersedianya mebel kantor	1	paket	1,919,371,870	DAU	Penyediaan mebel	4	unit	50.000.000
18.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	3	unit	24,000,000	DAU	Penyediaan sarana gedung kantor	3	unit	500.000.000
18.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	4	unit	18,000,000	DAU	Penyediaan sarana pendukung gedung kantor	4	unit	20,000,000
18.1.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				**197,801,000**					**1.510.000.000**
18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bl	1,199,000	DAU	Penyediaan jasa pengiriman surat dan materei	12	bl	50.000.000

1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	bl	38,944,000	DAU	Penyediaan biaya internet, listrik dan air	12	bl	1.000.000.000
18.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	12	bl	27,739,000	DAU	Penyediaan biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bl	320.000.000
18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas	12	bl	129,919,000	DAU	Penyediaan cleaning servis dan driver	12	bl	140.000.000
18.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				**224,842,000**					**470.000.000**
18.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas	12	bl	180,000,000	DAU	Penyediaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor	12	bl	190.000.000
18.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor	12	bl	2,022,000	DAU	Penyediaan biaya pemeliharaan mebel	12	bl	8.000.000
18.1.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit pemeliharaan aset tetap lainnya	3	unit	30,000,000	DAU	Pemeliharaan papan reklame	3	unit	32.000.000
18.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya	12	bl	12,820,000	DAU	Pemeliharaan gedung dan sarana gedung lainnya	12	bl	240.000.000
18.2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM**	DPMPTSP				**310,000,000**					**340.000.000**
18.2.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**130,000,000**					**140.000.000**
18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah dokumen fasilitas/insentif penanaman modal	1	dok	100,000,000	DAU		1	dok	100.000.000
18.2.2.01.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Monitoring dan evaluasi	4	keg	30,000,000	DAU		4	keg	40.000.000
18.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**100,000,000**					**200.000.000**
18.2.2.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah dokumen pedoman penanaman modal	1	dok	80,000,000	DAU	Penyusunan RUPM	1	dok	80.000.000
18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pemetaan profil penanaman modal	400	perus	100,000,000	DAU	Pemetaan profil umkm	500	perus	120.000.000
18.3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				**282,000,000**					**310.000.000**

1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
18.3.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	DPMPTSP				**282,000,000**					**310.000.000**
18.3.2.01.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Content layanan publik sistem informasi umkm	1	video	130,000,000	DAU	Pembuatan conten layanan masyarakat	1	video	130.000.000
					apl		DAU			apl	
18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pameran/forum investasi	2	kali	152,000,000	DAU	Penyelenggaraan even promosi	2	kali	180.000.000
18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				**385,927,000**					**260.000.000**
18.4.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				**385,927,000**					**260.000.000**
18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1125	NIB	92,334,000	DAU	Penyediaan daya dukung layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA	1125	NIB	260.000.000
			jumlah permohonan perizinan/nonperizinan melalui perizinan online	3000	pmh		DAU		3000	pmh	
18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	500	NIB	173,593,000	DAU	Tindak lanjut dan notifikasi perizinan OSS maupun non OSS	500	NIB	260,0000,000
			jumlah pemeriksaan dan verifikasi perizinan/ nonperizinan	600	pmh		DAU		600	pmh	
18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	DPMPTSP	Jumlah aduan ditindak lanjuti	10	aduan	20,000,000	DAU	Layanan pengaduan, konsultasi dan survei kepuasan masyarakat	10	aduan	60.000.000
			jumlah pemohon layanan konsultasi dan informasi	80	pmh		DAU		80	pmh	
			jumlah periode survei kepuasan masyarakat	2	kl		DAU		2	kl	
18.4.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Fasilitasi perizinan umkm	150	org	100,000,000	DAU	Fasilitasi perizinan UMKM	300	org	200.000.000
18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**96,000,704**					**84.000.000**
18.5.2.01	**Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**					**96,000,704**					**84.000.000**

1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	60	perus	21,229,204	DAU		60	perus	84.000.000
18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan penyusunan LKPM	60	perus	14,771,000	DAU		60	perus	230.000.000
18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pengawasan perizinan penanaman modal	100	perus	60,000,500	DAU		100	perus	100.000.000
18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**20,000,000**					**120.000.000**
18.6.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**20,000,000**					**120.000.000**
18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	dokumwn sistem informasi layanan publik	1	dok	20,000,000	DAU			dok	120.000.000
	Jumlah					**9,001,828,120**	DAU				**10.074.000.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2022 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Sragn yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian dan Pelaksnaaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Renja DPMPTSP Tahun 2022 terdapat 6 program dan 43 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen.

Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sesuai dengan usulan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai berikut;

Tabel IV.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Sumber Dana	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	4	5	6		7	8	9
18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**						**7,574,900,416**	
18.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPMPTSP					**4,082,794,301**	
18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bl	DAU	4,082,794,301	
18.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DPMPTSP				DAU	**48,436,000**	
18.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	tersedianya pakaian dinas dan atribut	38	stel	DAU	34,520,000	dukungan implementasi MPP
18.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya	4	org	DAU	13,916,000	
18.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah peserta sosialisasi	40	org	DAU	25,000,000	
18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	30	org	DAU	20,000,000	
18.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DPMPTSP				DAU	**1,131,655,245**	
18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	12	bl	DAU	26,735,245	
18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan kantor jumlah unit penyediaan peralatan kantor sebagai pengganti peralatan yang sudah rusak	12	bl	DAU	718,564,000	dukungan implementasi MPP

1	2	4	5	6		7	8	9
18.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga		unit	DAU		
18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai jumlah bulan penyediaan makan minum rapat dan tamu	12	bl	DAU	72,798,000	
18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12	bl	DAU	118,852,000	
18.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bl	DAU	3,600,000	
18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah	12	bl	DAU	100,000,000	
18.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip	12	bl	DAU	12,172,000	dukungan implementasi MPP
18.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan aplikasi	12	bl	DAU	78,934,000	dukungan implementasi MPP
18.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DPMPTSP				DAU	**1,919,371,870**	
18.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah unit penyediaan kendaraan bermotor roda dua	1	unit	DAU	35,000,000	
18.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Tersedianya mebel kantor	1	paket	DAU	1,919,371,870	dukungan MPP
18.1.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				DAU	**197,801,000**	
18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bl	DAU	1,199,000	
18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	bl	DAU	38,944,000	
18.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	12	bl	DAU	27,739,000	

1	2	4	5	6		7	8	9
18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas	12	bl	DAU	129,919,000	
18.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMPTSP				DAU	**194,842,000**	
18.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas	12	bl	DAU	180,000,000	
18.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor	12	bl	DAU	2,022,000	
18.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya	12	bl	DAU	12,820,000	
18.2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM**	DPMPTSP				DAU	**100,000,000**	
18.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				DAU	**100,000,000**	
18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pemetaan profil penanaman modal	400	perus	DAU	100,000,000	
18.3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				DAU	**152,000,000**	
18.3.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	DPMPTSP				DAU	**152,000,000**	
18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Pameran/forum investasi	2	kali	DAU	152,000,000	
18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP				DAU	**385,927,000**	

1	2	4	5	6		7	8	9
18.4.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	DPMPTSP				DAU	**385,927,000**	
18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1125	NIB	DAU	92,334,000	
			jumlah permohonan perizinan/nonperizinan melalui perizinan online	3000	pmh	DAU		
18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	500	NIB	DAU	173,593,000	
			jumlah pemeriksaan dan verifikasi perizinan/ nonperizinan	600	pmh	DAU		
18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	DPMPTSP	Jumlah aduan ditindak lanjuti	10	aduan	DAU	20,000,000	
			jumlah pemohon layanan konsultasi dan informasi	80	pmh	DAU		
			jumlah periode survei kepuasan masyarakat	2	kl	DAU		
18.4.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	Fasilitasi perizinan umkm	150	org	DAU	100,000,000	

1	2	4	5	6		7	8	9
18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					DAU	**96,000,704**	
18.5.2.01	**Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**					DAU	**96,000,704**	
18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	60	perus	DAU	21,229,204	
18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan penyusunan LKPM	60	perus	DAU	14,771,000	
18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah pengawasan perizinan penanaman modal	100	perus	DAU	60,000,500	
18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					DAU	**20,000,000**	
18.6.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					DAU	**20,000,000**	
18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	dokumwn sistem informasi layanan publik	1	dok	DAU	20,000,000	
	Jumlah					DAU	**8,328,828,120**	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2022. Renja ini merupakan tolok ukur untuk menentukan program/ kegiatan/ subkegiatan perangkat daerah tahun 2022.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif, sehingga, apabila terjadi kekurangan anggaran, maka dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan diupakayan tetap dapat mendukung pencapaian target kinerja.

Rencana Kerja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam RKPD Tahun 2022 serta rancangan RENSTRA 2021-2026.

Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah daerah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat

kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan rencana kerja ke depan.

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2022 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN,



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010